



PROGRAM KERJA PTA BANDARLAMPUNG TAHUN 2018



**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG
TAHUN 2018**

PROGRAM KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG TAHUN 2018

A. BIDANG YUDISIAL, WASBID DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

I. TEKNIK PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	No	PROGRAM KERJA	PERMASALAHAN	SASARAN	KEGIATAN	HASIL / OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan dan penyelesaian perkara	1	Peningkatan Pembinaan Oleh Pimpinan dan pengawas bidang	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kurang efektif - Pengawasan Tidak Efektif - Kurangnya Komitmen 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya Integritas ASN - Tidak adanya penyimpangan/pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan PTA/PA melakukan pembinaan secara rutin - Hakim melakukan pengawasan dan membuat laporan hasil pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya program kinerja PTA/PA - Program kerja dilaksanakan secara benar dan tepat waktu 	Program berjalan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya pelanggaran /Komplain - Terdeteksinya setiap pelanggaran dan penyimpangan 	Pembinaan Minimal Satu kali dalam satu bulan Pengawasan Minimal 3 bulan sekali
	2	Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap Putusan Hakim	Pengawasan Kurang efektif dan Ekonomis	Terwujudnya pelayanan perkara yang baik	Melakukan Eksaminasi terhadap berkas dan putusan hakim	Putusan PA Yang baik dan tepat waktu	Kepatuhan dan kepuasan masyarakat	Tidak adanya komplain dari stakeholder	Satu tahun dua kali
	3	Peningkatan Proses dan Administrasi pengawasan terhadap PTA/PA Dan optimalisasi hasil pengawasan	Belum tertibnya Administrasi dan pelaporan hasil pengawasan	Efektifitas Hakim pengawas bidang PTA/PA	Merumuskan SOP Pengawasan dan format pelaporan hasil pengawasan	Peningkatan Kualitas Kinerja	Kualitas kinerja yang baik	Kepuasan Internal dan Eksternal	Awal Tahun

	4	Peningkatan pengawasan melekat	Pengawasan melekat tidak berjalan dengan baik	Terlaksananya program kerja PTA dan PA	1. Atasan langsung memantau kinerja bawahan 2. Atasan Langsung memeriksa laporan pelaksanaan kinerja bawahnya	Pelaksanaan tugas berjalan dengan baik	Laporan hasil pekerjaan yang akuntabel	Tidak adanya komplain dari stakeholder	Setiap Waktu
	5	Peningkatan pengetahuan AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	Hakim dan ASN kurang memahami AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan berbasis AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	1. DDTK 2. Pembinaan oleh pimpinan	Pembinaan dan pengawasan berbasis AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	Terselenggaranya Peradilan yang berbasis AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	Hasil pembinaan dan pengawasan sejalan dengan nilai AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	Sesuai Kebutuhan

II. TEKNIK YUSTISIAL DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	No	PROGRAM KERJA	PERMASALAHAN	SASARAN	KEGIATAN	HASIL / OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR KEBERHASILAN
A. Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1	Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Presentase penyelesaian perkara - Masih banyak sisa perkara di akhir tahun - Relas masih menghambat 	<p>Pelaksanaan Court calendar yang tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan pemanggilan 	<p>Pembinaan dan gelar perakara/ pleno perkara terhadap para pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientasi Hukum Acara 	<p>Peningkatan ketercapaian penyelesaian perkara oleh majelis Hakim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang tepat waktu 	<p>Majlis Hakim yang Akuntabel</p> <p>Pemanggilan cepat dan tepat</p>	<p>Sisa perkara tidak melebihi 10% setiap akhir tahun</p> <p>Ketepatan court calendar perkara</p>

		<ul style="list-style-type: none"> permeriksaan - Delegasi masih belum optimal terutama karena perubahan alamat disebabkan pemekaran wilayah yang mengakibatkan perubahan radius 	<ul style="list-style-type: none"> sederahana - Tertib pemanggilan Delegasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Update Radius dan Wilayah Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pemanggilan cepat dan tepat waktu - Proses persidangan bisa berjalan dengan tertib dan lancar 		
2	Peningkatan mutu BAS dan Putusan	Belum seragamnya format BAS dan Putusan	Peningkatan Kualitas Hakim dan PP	Sosialisasi BAS dan Putusan Versi Badilag	Peningkatan Kualitas Hakim dan PP yang Akuntabel	Pejabat Hakim dan PP yang akuntabel	Penyeragaman Format BAS Dan Putusan
3	Peningkatan tata kelola pemungutan dan Penyetoran PNBP	Belum tertibnya pemungutan dan penyetoran sesuai peraturan perundang-undangan	Tertib administrasi dan Pelaporan PNBP	Sosialisasi	Transparan	Akuntabel	Tertib Pengelolaan PNBP
4	Penyeragaman Panjar Biaya eksekusi	Belum seragamnya penentuan Biaya Eksekusi	Kepastian Komponen Biaya eksekusi	Sosialisasi	Transparan	Akuntabel	Tertib Pengelolaan Biaya eksekusi
5	Pemantapan prosedur Mediasi	Mediasi belum dilaksanakan sesuai ketentuan	Peningkatan efektifitas Lembaga mediasi	Sosialisasi	Kepercayaan Publik	Menurunkan tingkat perselisihan	Kepuasan masyarakat
6	Upgrading Petugas Meja Informasi dan Pengaduan, serta Kehumasan	Petugas Meja informasi kurang memahami fungsi meja informasi dipengadilan	Meningkatkan kualitas pelayanan meja informasi dan pengaduan	Sosialisasi, simulasi, meja informasi dan kehumasan	Informasi yang akuntabel	Kepuasan masyarakat	Tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan

B. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan dan penyelesaian perkara	1	Peningkatan mutu pelaporan dan keuangan perkara	Belum terintegrasinya pengambilan sisa panjar dengan aplikasi E-skum	Peningkatan kepercayaan public	Menyusun program sosialisasi penggunaan Aplikasi E-Skum	Transparan	Wibawa Peradilan	Masyarakat terbantu dalam memonitoring hak-haknya
	2	Optimalisasi Hasil Eksaminasi	Belum satu persepsi terhadap hasil eksaminasi	Pedoman bahan pembinaan	Pleno hasil eksaminasi	Rumusan pembinaan	Pedoman Eksaminasi	Pasti dan Akuntabel
	3	Peningkatan penyelesaian perkara Anggota TNI/Polri	Perkara diajukan belum mendapatkan izin dari pimpinan	Menyatukan Persepsi terhadap efektifitas perkara Anggota TNI/Polri	Sosialisasi Peraturan Panglima TNI No.Perpam/II/VII/2 017 tanggal 14 Juli 2017	Efektifitas Hukum penyelesaian Perkara	Kesepahaman penyelesaian Perkara	Kepuasan Instansional dan persamaan persepsi
C. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat marginal	1	Efektifitas pelayanan posbakum prodeo dan sidang keliling	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pelayanan Posbakum yang tepat waktu - Kurang selektif dan kurang objektif dalam menentukan pihak yang menerima prodeo - Pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga bantuan hukum harus melakukan pelayanan tepat waktu - Masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan secara administratif wajib dilayani untuk berperkara prodeo - Menjaga 	<ul style="list-style-type: none"> - Orientasi pemantapan kontrak kinerja - Sosialisasi hak dan kewajiban administrasi masyarakat miskin - Orientasi prototipe dan 	<ul style="list-style-type: none"> - optimalisasi pelayanan posbakum - masyarakat miskin terlayani dengan baik - Peningkatan kepercayaan publik terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya jumlah perkara dan layanan sesuai kotrak dan azas peradilan - Kejelasan syarat dan prosedur pelayanan prodeo - Persidangan berjalan sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat - Kepastian masyarakat miskin dan perkara prodeo - Kepuasan terhadap pelayanan PA

			sidang keliling dan sidang terpadu belum mencerminkan wibawa peradilan	marwah dan wibawa lembaga peradilan dalam pelaksanaan sidang keliling dan sidang terpadu	protokoler tata ruang sidang	PA		
D.Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan	1	Peningkatkan kepatuhan terhadap proses persidangan	- Belum patuhnya sebagian para pihak terhadap teguran dan panggilan PA	- Kepatuhan masyarakat dan petugas	- Sosialisasi tentang tugas dan fungsi peradilan	Kepatuhan masyarakat terhadap proses persidangan	- Putusan peradilan yang akuntabel	Adanya kepastian Hukum dalam melaksanakan putusan PA
	2	Peningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	- Kurangnya kepatuhan Hukum terhadap Putusan Pengadilan - Belum terealisasi pembebanan kepada pihak pemohon dalam cerai talak	Kepastian Hukum Bagi Para Pencari Keadilan	- Hukum jaminan, Sita eksekusi, orientasi penegakan Hukum - Pernyataan pihak untuk patuh terhadap putusan pengadilan	Kepatuhan masyarakat terhadap putusan persidangan	- Kepuasan Masyarakat - Meningkatkan Wibawa Lembaga Peradilan	Indeks Kepuasan Masyarakat dan kepatuhan masyarakat meningkat

B. BAGIAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

NO	PROGRAM KINERJA	PERMASALAHAN	SASARAN	KEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI	INDIKATOR KEBERHASILAN	JADWAL
1	Peningkatan kinerja bagian Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi kerja rendah Kurangnya komitmen Kurangnya pemahaman tentang tupoksi 	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya hak-hak pegawai Terupdatenya data base pegawai melalui SIKEP dan ABS Tersedianya analisis beban kerja dan analisis jabatan Terlaksananya disiplin pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> DDTK Pembinaan oleh Pimpinan (Ketua, Sekretaris, Kasubag) Peningkatan sarana dan prasarana Mengoptimalkan penggunaan finger scan Daftar Hadir dimonitoring oleh PTA maksimal setiap 3 bulan sekali Upgrading PNS dan Honor 	<ol style="list-style-type: none"> Hak pegawai tepat waktu Database yang valid Pegawai Disiplin 	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action plan (Satker PTA/PA)</i>
2	Peningkatan Kinerja bagian Umum	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi kerja rendah Kurangnya komitmen Kurangnya pemahaman tentang tupoksi 	<ol style="list-style-type: none"> Terpenuhinya sarana dan prasarana Tertib pengelolaan aset melalui SIMAK-BMN, aplikasi persediaan Terlaksananya ketertiban, kebersihan dan keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> DDTK Pembinaan oleh Pimpinan (Ketua, Sekretaris, Kasubag) 	<ol style="list-style-type: none"> Ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pelaporan tepat waktu 	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action plan (Satker PTA/PA)</i>
3	Peningkatan Kinerja bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi kerja rendah 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya Pengelolaan 	<ol style="list-style-type: none"> DDTK Perencanaan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Administrasi keuangan 	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kurangnya komitmen 3. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. anggaran yang akuntabel 2. Tertib administrasi keuangan 3. Pelaporan SAIBA dan SIMAN yang tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 3. berbasis kinerja Pembinaan oleh Pimpinan (Ketua, Sekretaris, Kasubag) 	<ol style="list-style-type: none"> yang akuntabel 2. Pelaporan tepat waktu 		<p><i>plan</i> (Satker PTA/PA)</p>
4	Pengelolaan Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi kerja rendah 2. Kurangnya komitmen 3. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi 4. Seluruh informasi yang diupdate pada website dipegang oleh admin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya keterbukaan informasi melalui updating website 2. <i>Maintenance</i> sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DDTK 2. Pembinaan oleh Pimpinan (Ketua, Sekretaris, Kasubag) 3. Diberikan user kepada masing-masing bagian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang disampaikan update 2. Tidak ada Komplain 3. Masing-masing user mengisi menu yang ada di website. 	Informasi yang selalu Update secara realtime.	<p><i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)</p>
5	Pengelolaan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi kerja rendah 2. Kurangnya komitmen 3. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi 4. Ruang perpustakaan yang belum representatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pemanfaat perpustakaan 2. Tertib pengelolaan melalui katalog 	DDTK oleh tenaga ahli.	Pemanfaatan perpustakaan	Tidak ada komplain stake holder	<p><i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)</p>
6	Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi kerja rendah 2. Kurangnya komitmen 3. Kurangnya 	Terlayani kepentingan stake holder/Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistensi 2. Monitoring Risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertib kinerja 2. Pelayanan semakin baik 	Tidak ada komplain stake holder	<p><i>Breakdown to action plan</i> (Satker</p>

		pemahaman tentang tupoksi					PTA/PA)
7	Peningkatan Pengawasan/Controlling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi kerja rendah 2. Kurangnya komitmen 3. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi 	Tercapainya program kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan melekat (atasan langsung) 2. Pengawasan oleh Hawasbid 	Program kerja yang sudah ditetapkan terlaksana	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)
8.	Struktur Organisasi yang sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi sesuai SK KMA nomor 7 Tahun 2015 belum terpenuhi 	Struktur Organisasi yang sesuai KMA no.7 Tahun 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Struktur Organisasi sesuai KMA No. 7 Tahun 2015. 2. Pengajuan tenaga fungsional sesuai surat edaran Mahkamah Agung dan Satker Pembina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi Sesuai KMA Nomor 7 Tahun 2015 terpenuhi. 2. Terpenuhinya Tenaga Fungsional bidang kesekretariatan 	Administrasi kesekretariatan dan kepanitaraan berjalan dengan baik.	<i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)
9.	Penempatan Pegawai yang Sesuai dan Komposisi yang berimbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan Pegawai yang tidak sesuai keahliannya. 2. Komposisi Pegawai kepanitaraan dan kesekretariatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan Pegawai yang sesuai keahliannya. 2. Komposisi Pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan analisis jabatan 2. Pembuatan analisis beban kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. 	Administrasi kesekretariatan dan kepanitaraan berjalan dengan tertib.	<i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)

		yang tidak berimbang	Kesekretariatan dan Kepaniteraan yang berimbang		2. TPM mempertimbangkan Analisis jabatan dan analisis beban kerja 3. Komposisi pegawai yang sesuai.		
10.	Penyusunan Anggaran dan Revisi Anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Lambatnya pengumpulan berkas - Jangka waktu pembuatan dan pengumpulan yang singkat - Item usulan pada RKA KL tidak tepat sasaran - Revisi tanpa koordinasi dengan PTA 	Tersusunnya usulan <i>RKA KL, TOR, SRAA dan revisi</i> DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dan penelaahan usulan RKA KL, TOR dan SRAA DIPA 01 dan 04 - Koordinasi dengan Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung - Pengumpulan dan pengarsipan data revisi DIPA 01 dan 04 	<ul style="list-style-type: none"> - Terhimpunnya RKA KL, TOR dan SRAA DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung serta Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung - Terhimpunnya data revisi Pengadilan Agama se Provinsi Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Terinputnya data rencana penarikan anggaran dipa 01 pada aplikasi RKA KL - Terkumpulnya data rencana penarikan anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung yang tepat sasaran - Terkirimnya data RKA KL DIPA 01 pada Rencana Program dan Anggaran Mahkamah Agung RI - Terhimpunnya data revisi anggaran Pengadilan Agama se Provinsi Lampung 	Januari - November
11.	Desin website standar badilag.	Design website belum standard.	Website PA sewilayah PTA Bandar Lampung.	Redesign website sesuai standard badilag.	1. Design website Peng	Tidak ada komplain stake holder	Januari- Maret

					adilan Agama Se-wilayah PTA Bandarlampung sudah sesuai standard website badilag. 2. Update data disitiap content		
12.	Peningkatan penelaahan, penyusunan dan pemrosesan Pagu minus belanja pegawai	- Terlambatnya laporan pagu minus dari Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung - Terlambatnya revisi Pagu minus belanja pegawai dari Dirjen Anggaran	- Tersusunnya Pagu minus belanja pegawai tepat waktu - Terprosesnya Pagu minus belanja pegawai ke Renprog Mahkamah Agung RI tepat waktu	- Pengumpulan data dari satker Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung Tepat waktu - Penelaahan Pagu minus belanja pegawai oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung - Pengiriman data ke Renprog Mahkamah Agung RI Tepat Waktu	Terprosesnya Pagu minus belanja pegawai ke Renprog Mahkamah Agung RI Tepat waktu	- Terkumpulnya data Pagu minus belanja pegawai dari PA sewilayah PTA Bandar Lampung - Tertelaahnya rekap data pagu minus belanja pegawai - Terkirimnya rekap data pagu minus belanja pegawai ke Renprog Mahkamah Agung RI Tepat waktu	Oktober- November
13.	Peningkatan matriks rencana penarikan DIPA 01 dan DIPA 04	- Tidak sesuainya antara matrik rencana penarikan DIPA dengan realisasi belanja	Sesuai jadwal realisasi belanja anggaran dengan matrik rencana	- Perencanaan jadwal realisasi anggaran bekerjasama dengan bagian keuangan	Terbuatnya matriks rencana penarikan DIPA 01 dan DIPA 04	- Terbuatnya Matriks rencana penarikan dipa 01 dan dipa 04	Januari

		anggaran	penarikan DIPA	- Pembuatan matrik rencana penarikan DIPA		- Terbaginya anggaran sesuai bulan pelaksanaan - terbaginya anggaran sesuai penanggung jawab kegiatan	
14.	Penginputan data Rencana Anggaran pada aplikasi sirup.lkpp.go.id dan komdanas dengan tepat waktu	- Penginputan data RKA KL pada aplikasi sirup.lkpp.go.id dan komdanas tidak tepat waktu - Website sirup.lkpp.go.id sering error	Terinputnya data RKAKL Pengadilan Agama se Provinsi Lampung pada aplikasi sirup.lkpp.go.id dan komdanas	- Pengawasan penginputan data RKA KL Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung	Terinputnya data RKAKL Pengadilan Agama se Provinsi Lampung pada aplikasi sirup.lkpp.go.id dan komdanas tepat waktu	- Teruploadnya data RKA KL dipa 01 dan 04 pada aplikasi sirup.lkpp.go.id dan komdanas tepat waktu - Terumumkannya anggaran belanja modal pada aplikasi sirup.lkpp.go.id tepat waktu	November-Desember

C. BIDANG ORGANISASI PENUNJANG

NO	PROGRAM KINERJA	PERMASALAHAN	SASARAN	KEGIATAN	HASIL YANG AKAN DICAPAI	INDIKATOR KEBERHASILAN	JADWAL
1	Peningkatan kinerja bagian Kepegawaian	4. Motivasi kerja rendah 5. Kurangnya komitmen 6. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi	5. Terpenuhinya hak-hak pegawai 6. Terupdatenya data base pegawai melalui SIKEP dan ABS 7. Tersedianya analisis beban	7. DDTK 8. Pembinaan oleh Pimpinan (Ketua, Sekretaris, Kasubag) 9. Peningkatan sarana dan prasarana 10. Mengoptimalkan penggunaan finger scan	4. Hak pegawai tepat waktu 5. Database yang valid 6. Pegawai Disiplin	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)

			<p>kerja dan analisis jabatan</p> <p>8. Terlaksananya disiplin pegawai</p>	<p>11. Daftar Hadir dimonitoring oleh PTA maksimal setiap 3 bulan sekali</p> <p>12. Upgrading PNS dan Honor</p>			
2	Peningkatan Kinerja bagian Umum	<p>4. Motivasi kerja rendah</p> <p>5. Kurangnya komitmen</p> <p>6. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi</p>	<p>4. Terpenuhinya sarana dan prasarana</p> <p>5. Tertib pengelolaan aset melalui SIMAK-BMN, aplikasi persediaan</p> <p>6. Terlaksananya ketertiban, kebersihan dan keamanan</p> <p>7.</p>	<p>3. DDTK</p> <p>4. Pembinaan oleh Pimpinan (Ketua, Sekretaris, Kasubag)</p>	<p>3. Ketertiban, kenyamanan dan keamanan</p> <p>4. Pelaporan tepat waktu</p>	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action plan (Satker PTA/PA)</i>
3	Peningkatan Kinerja bagian Keuangan	<p>4. Motivasi kerja rendah</p> <p>5. Kurangnya komitmen</p> <p>6. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi</p>	<p>4. Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang akuntabel</p> <p>5. Tertib administrasi keuangan</p> <p>6. Pelaporan SAIBA dan SIMAN yang tepat waktu</p>	<p>4. DDTK</p> <p>5. Perencanaan anggaran berbasis kinerja</p> <p>6. Pembinaan oleh Pimpinan (Ketua, Sekretaris, Kasubag)</p>	<p>3. Administrasi keuangan yang akuntabel</p> <p>4. Pelaporan tepat waktu</p>	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action plan (Satker PTA/PA)</i>
4	Pengelolaan Teknologi Informasi	<p>5. Motivasi kerja rendah</p> <p>6. Kurangnya komitmen</p> <p>7. Kurangnya pemahaman tentang</p>	<p>3. Terwujudnya keterbukaan informasi melalui updating website</p> <p>4. <i>Maintenance</i></p>	<p>4. DDTK</p> <p>5. Pembinaan oleh Pimpinan (Ketua, Sekretaris, Kasubag)</p> <p>6. Diberikan user kepada</p>	<p>4. Informasi yang disampaikan update</p> <p>5. Tidak ada</p>	Informasi yang selalu Update secara realtime.	<i>Breakdown to action plan (Satker PTA/PA)</i>

		8. tupoksi Seluruh informasi yang diupdate pada website dipegang oleh admin	sistem	masing-masing bagian	Komplain 6. Masing-masing user mengisi menu yang ada di website.		
5	Pengelolaan Perpustakaan	5. Motivasi kerja rendah 6. Kurangnya komitmen 7. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi 8. Ruang perpustakaan yang belum representatif	3. Terlaksananya pemanfaat perpustakaan 4. Tertib pengelolaan melalui katalog	DDTK oleh tenaga ahli.	Pemanfaatan perpustakaan	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)
6	Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu	4. Motivasi kerja rendah 5. Kurangnya komitmen 6. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi	Terlayani kepentingan stake holder/Pelanggan	3. Asistensi 4. Monitoring Risiko	3. Tertib kinerja 4. Pelayanan semakin baik	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)
7	Peningkatan Pengawasan/Controlling	4. Motivasi kerja rendah 5. Kurangnya komitmen 6. Kurangnya pemahaman tentang tupoksi	Tercapainya program kerja	3. Pengawasan melekat (atasan langsung) 4. Pengawasan oleh Hawasbid	Program kerja yang sudah ditetapkan terlaksana	Tidak ada komplain stake holder	<i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)
8.	Struktur Organisasi yang sesuai	2. Struktur organisasi sesuai SK KMA nomor 7 Tahun 2015 belum	Struktur Organisasi yang sesuai KMA no.7 Tahun 2015	3. Sosialisasi Struktur Organisasi sesuai KMA No. 7 Tahun 2015. 4. Pengajuan tenaga	3. Struktur Organisasi Sesuai KMA Nomor 7	Administrasi kesekretariatan dan kepanitaraan berjalan dengan	<i>Breakdown to action plan</i> (Satker

		terpenuhi		fungsional sesuai surat edaran Mahkamah Agung dan Satker Pembina.	Tahun 2015 terpenuhi. 4. Terpenuhinya Tenaga Fungsional bidang kesekretarian	baik.	PTA/PA)
9.	Penempatan Pegawai yang Sesuai dan Komposisi yang berimbang	3. Penempatan Pegawai yang tidak sesuai keahliannya. 4. Komposisi Pegawai kepaniteraan dan kesekretarian yang tidak berimbang	3. Penempatan Pegawai yang sesuai keahliannya. 4. Komposisi Pegawai Kesekretarian dan Kepaniteraan yang berimbang	3. Pembuatan analisis jabatan 4. Pembuatan analisis beban kerja	4. Pegawai ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya. 5. TPM mempertimbangkan Analisis jabatan dan analisis beban kerja 6. Komposisi pegawai yang sesuai.	Administrasi kesekretarian dan kepaniteraan berjalan dengan tertib.	<i>Breakdown to action plan</i> (Satker PTA/PA)
10.	Penyusunan Anggaran dan Revisi Anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran	- Lambatnya pengumpulan berkas - Jangka waktu pembuatan dan pengumpulan yang	Tersusunnya usulan RKA KL, TOR, SRAA dan revisi DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Bandar	- Pengawasan dan penelaahan usulan RKA KL, TOR dan SRAA DIPA 01 dan 04 - Koordinasi dengan	- Terhimpunnya RKA KL, TOR dan SRAA DIPA 01 dan 04 Pengadilan	- Terinputnya data rencana penarikan anggaran dipa 01 pada aplikasi RKA KL - Terkumpulnya	Januari - November

		<p>singkat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Item usulan pada RKA KL tidak tepat sasaran - Revisi tanpa koordinasi dengan PTA 	<p>Lampung serta Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang berkualitas</p>	<p>Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan dan pengarsipan data revisi DIPA 01 dan 04 	<p>Tinggi Agama Bandar Lampung serta Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terhimpunnya data revisi Pengadilan Agama se Provinsi Lampung 	<p>data rencana penarikan anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung yang tepat sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkirimnya data RKA KL DIPA 01 pada Rencana Program dan Anggaran Mahkamah Agung RI - Terhimpunnya data revisi anggaran Pengadilan Agama se Provinsi Lampung 	
11.	Desin website standar badilag.	Design website belum standard.	Website PA sewilayah PTA Bandarlampung.	Redesign website sesuai standard badilag.	<p>3. Design website Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bandarlampung sudah sesuai standard website badilag.</p> <p>4. Update data disitiap content</p>	Tidak ada komplain stake holder	Januari-Maret
12.	Peningkatan penelaahan,	- Terlambatnya laporan pagu minus dari	- Tersusunnya Pagu minus belanja	- Pengumpulan data dari satker Pengadilan Agama	Terprosesnya Pagu minus	- Terkumpulnya data Pagu minus	Oktober-November

	penyusunan dan pemrosesan Pagu minus belanja pegawai	Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung - Terlambatnya revisi Pagu minus belanja pegawai dari Dirjen Anggaran	pegawai tepat waktu - Terprosesnya Pagu minus belanja pegawai ke Renprog Mahkamah Agung RI tepat waktu	sewilayah PTA Bandar Lampung Tepat waktu - Penelaahan Pagu minus belanja pegawai oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung - Pengiriman data ke Renprog Mahkamah Agung RI Tepat Waktu	belanja pegawai ke Renprog Mahkamah Agung RI Tepat waktu	belanja pegawai dari PA sewilayah PTA Bandar Lampung - Tertelaahnya rekap data pagu minus belanja pegawai - Terkirimnya rekap data pagu minus belanja pegawai ke Renprog Mahkamah Agung RI Tepat waktu	
13.	Peningkatan matriks rencana penarikan DIPA 01 dan DIPA 04	- Tidak sesuai antara matrik rencana penarikan DIPA dengan realisasi belanja anggaran	Sesuai jadwal realisasi belanja anggaran dengan matrik rencana penarikan DIPA	- Perencanaan jadwal realisasi anggaran bekerjasama dengan bagian keuangan - Pembuatan matrik rencana penarikan DIPA	Terbuatnya matriks rencana penarikan DIPA 01 dan DIPA 04	- Terbuatnya Matriks rencana penarikan dipa 01 dan dipa 04 - Terbaginya anggaran sesuai bulan pelaksanaan - terbaginya anggaran sesuai penanggung jawab kegiatan	Januari
14.	Penginputan data Rencana Anggaran pada aplikasi sirup.lkpp.go.id dan komdanas dengan tepat waktu	- Penginputan data RKA KL pada aplikasi sirup.lkpp.go.id dan komdanas tidak tepat waktu - Website sirup.lkpp.go.id sering error	Terinputnya data RKAKL Pengadilan Agama se Provinsi Lampung pada aplikasi sirup.lkpp.go.id dan komdanas	- Pengawasan penginputan data RKA KL Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandar Lampung	Terinputnya data RKAKL Pengadilan Agama se Provinsi Lampung pada aplikasi sirup.lkpp.go.id	- Teruploadnya data RKA KL dipa 01 dan 04 pada aplikasi sirup.lkpp.go.id dan komdanas tepat waktu - Terumumkannya anggaran belanja	November-Desember

					dan komdanas tepat waktu	modal pada aplikasi sirup.lkpp.go.id tepat waktu	
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

Bandarlampung, 1 Februari 2018

Ketua PTA Bandarlampung



Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.